

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Identifikasi Masalah**

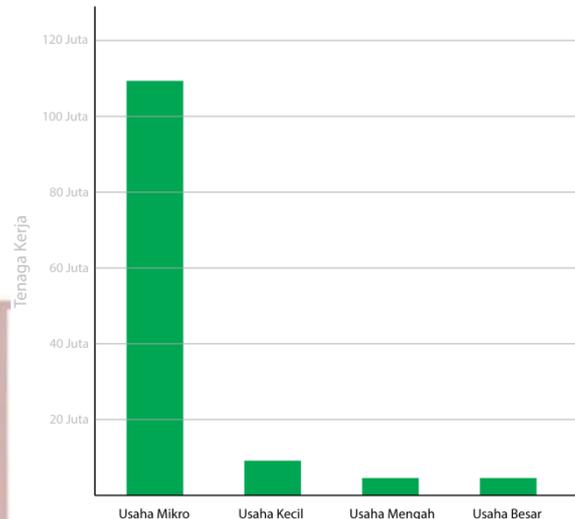
Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang baik dari kinerja suatu bangsa, terutama dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pendapatan nasional. Perkembangan di beberapa industri pada akhirnya berdampak pada peningkatan kesempatan kerja yang seringkali tidak mampu menampung seluruh tenaga kerja yang jumlahnya terus meningkat. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mencapai stabilitas nasional, masyarakat adil dan makmur dapat dicapai melalui penciptaan lapangan kerja, pemerataan, dan pendapatan yang lebih tinggi bagi individu.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran penting dan esensial dalam pertumbuhan ekonomi nasional. UMKM berkontribusi dalam pemerataan hasil pembangunan selain pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja (Hasanah et al, 2020). UMKM sangat penting bagi pertumbuhan dan perlindungan perekonomian Indonesia. Hal ini terlihat ketika krisis ekonomi 1997 melanda Indonesia. UMKM yang saat itu masih dikenal sebagai Usaha Kecil Menengah menjadi katup penyelamat bagi pemulihan ekonomi negara karena mampu meningkatkan PDB dan penyerapan tenaga kerja secara signifikan (Ravik, 2007). Pertumbuhan UMKM dipandang dapat meningkatkan pondasi perekonomian nasional karena seringkali mengandalkan sumber daya ekonomi lokal daripada impor dan mampu mengekspor produknya karena keunikannya (Widyaresti, 2012).

UMKM telah lama diakui sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia. UMKM mampu menggerakkan roda perekonomian di Indonesia sekaligus menjadi sumber pendapatan utama sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu Pemberdayaan UMKM sangat penting untuk diperhatikan (Wicaksono, 2014). Saat ini terdapat 64,2 juta UMKM di Indonesia, dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07 persen dan nilai 8.573,89 triliun rupiah berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM. Selain berkontribusi pada pembentukan PDB, UMKM dapat berperan dalam

menawarkan beragam peluang kerja bagi masyarakat karena mampu menyerap hingga 96,92 persen dari seluruh tenaga kerja Indonesia pada 2019. Sedangkan perusahaan besar menyumbang 3,08 persen dari total.

*Gambar 1. 1 Grafik Penyerapan Tenaga Kerja dari Unit Usaha Indonesia 2019*



*Sumber : Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah*

Meski berperan penting dalam perekonomian nasional, UMKM tidak selalu berjalan mulus karena masih banyak tantangan yang harus dihadapi pelaku UMKM. Keterbatasan tersebut antara lain kurangnya modal usaha, kekurangan sumber daya manusia, dan kurangnya teknologi yang tersedia (Setianto et al, 2016). Salah satu penyebab sektor UMKM tidak berkembang adalah kurangnya dana yang tersedia bagi pelaku usaha untuk membangun usahanya.

Salah satu alat penting untuk bisnis, baik yang baru dimulai maupun yang sudah berjalan, adalah modal perusahaan (Salahudin et al, 2018). Pemerintah telah berupaya memberikan berbagai skema kredit dan dukungan permodalan kepada UMKM melalui undang-undangnya, namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pinjaman modal tersebut menjadi tantangan bagi pelaku UMKM untuk didapatkan (Hadi, 2015). Selain itu, menurut LPPi dan Bank Indonesia (2015), antara 60 hingga 70 persen UMKM kekurangan akses permodalan, terutama dari perbankan. Hambatan geografis yang menghalangi banyak bank untuk menjangkau daerah terpencil, keterbatasan administratif yang ditimbulkan oleh pengelolaan usaha UMKM yang masih ditangani secara manual dan kuno, serta

pengelolaan keuangan dimana pengelola UMKM belum bisa membedakan antara dana operasional rumah tangga dan usaha.

Salah satu hambatan paling signifikan bagi pertumbuhan wirausahawan adalah kurangnya modal. Pinjaman UMKM mencapai sekitar Rp. 1.000 triliun, atau 20% dari keseluruhan kredit perbankan, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS). Karena kurangnya informasi tentang debitur yang memenuhi syarat untuk pembiayaan, bank tampaknya mengalami masalah dalam mengeluarkan kredit. Karena UMKM hanya 20% dari keseluruhan kredit, maka pinjaman UMKM hanya 8% dari PDB. Kepemilikan modal yang lemah disebabkan oleh ketidakmampuan usaha kecil untuk mengakumulasi modal, dan sebagian besar pelaku UMKM masih berskala mikro, dengan produktivitas rendah dan tanpa agunan, sehingga bank tidak dapat menyalurkan kredit.

Upaya pemberdayaan UMKM dilakukan dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi daerah dan nasional serta peningkatan daya saing produk UMKM, mengingat pentingnya peran UMKM. Untuk mendorong lembaga keuangan, khususnya perbankan, untuk berperan aktif dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana, salah satu inisiatif untuk meningkatkan peran usaha mikro adalah sebagai berikut: Secara teori, lembaga perbankan memiliki peran ganda sebagai perantara, penyalur dana dari masyarakat, pemerintah, dan organisasi swasta dalam bentuk kredit, serta bertindak sebagai agen pembangunan. Bank seharusnya juga dapat mendorong pertumbuhan yang berpihak pada masyarakat miskin di samping mendorong pertumbuhan ekonomi.

UMK harus memperluas kapasitas produksi mereka untuk mengembangkan bisnis mereka, yang memerlukan sejumlah besar modal. UMK belum mampu mengikuti tuntutan pelanggan yang terus berubah dan belum mampu bersaing secara global karena kekurangan kas dan kurangnya kompetensi dan keahlian sumber daya manusia (SDM) dalam mengelola bisnis (LPPI dan BI, 2015). Akibatnya, sebagian besar UMK beroperasi di bawah 10 tahun. Masalah tersulit adalah permodalan dan akses pembiayaan. (Rachbini, 1994).

Dalam hal pertumbuhan bisnis, modal memainkan peran penting dalam pendirian perusahaan kecil. Hasil yang rendah adalah akibat dari kurangnya modal

(Daniel, 2002). Modal yang lemah tidak akan dapat memulai usaha bagi pedagang kecil atau mengembangkan usahanya, karena dalam jangka panjang modal merupakan kumpulan sumber pendanaan yang digunakan oleh perusahaan untuk berkembang (Keown, 2000). Maka dari itu LKM adalah salah satu lembaga yang menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat yang seharusnya membantu pengusaha, khususnya usaha kecil.

Ketidakstabilan keuangan dan risiko terkait erat dalam dunia bisnis; namun, bahaya semakin besar dalam perkembangan UMKM karena aset kecil menyebabkan uang bisnis habis ketika harus membayar komitmen kredit, terutama ketika inflasi dan suku bunga tinggi. Peningkatan inflasi dan suku bunga akan meningkatkan biaya keuangan dalam bisnis, berpotensi membahayakan kelangsungan bisnis mereka. Selain itu, permodalan merupakan hambatan yang paling signifikan bagi perkembangan UMKM. UMKM harus mempertimbangkan uang karena sering menghadapi prospek usaha yang besar. UMKM, di sisi lain, tidak dapat memperluas operasi mereka karena kurangnya keuangan.

Keuangan mikro, sering dikenal sebagai *microfinance*, telah meledak popularitasnya dalam dua dekade terakhir. Sejak awal 1980-an, ketika Muhammad Yunus (peraih Nobel Perdamaian 2006) menciptakan inisiatif Grameen Bank di Bangladesh, ini telah sukses besar (Baskara, 2013). Di negara berkembang keuangan mikro adalah jenis pembiayaan yang berkembang dengan tujuan utama untuk mengurangi angka kemiskinan dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Imai et al., 2010; Ghalib et al., 2011). Lembaga keuangan mikro, secara umum, memberikan pinjaman (biasa disebut sebagai kredit mikro) kepada orang-orang dengan akses terbatas sebagai bagian dari berbagai layanan keuangan mikro. Keuangan mikro, sering dikenal sebagai lembaga keuangan mikro, mengacu pada pinjaman yang relatif sederhana yang ditawarkan kepada konsumen berpenghasilan rendah untuk membantu mereka memulai bisnis mereka sendiri.

Pemerintah Indonesia menggunakan keuangan mikro (*microfinance*) sebagai metode untuk mencapai pembangunan dengan tiga cara sekaligus: melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan upah masyarakat, dan pengurangan kemiskinan. Agar wirausahawan mikro dapat meningkatkan kapasitas usahanya

dan agar keluarga berpenghasilan rendah menjadi kurang rentan terhadap eksploitasi, keduanya membutuhkan akses ke layanan keuangan yang berkelanjutan.

Sebagaimana dibuktikan oleh peningkatan pengeluaran untuk kesehatan, pendidikan, dan konsumsi, di antara indikator lainnya, keuangan mikro telah dianggap sebagai instrumen yang baik untuk mengurangi kemiskinan. Keuangan mikro tidak dapat bertahan tanpa dukungan penuh dari lembaga keuangan. Banyak usaha kecil terhambat oleh kurangnya akses permodalan dari lembaga keuangan tradisional. Akibatnya, beberapa Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB), muncul dan berkembang untuk menjalankan berbagai kegiatan usaha, jasa pengembangan perusahaan, dan pemberdayaan rumah tangga baik yang didirikan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah nama yang diberikan kepada organisasi-organisasi ini. (Aprilia & Ananda, 2019).

Kuangan mikro sangat penting karena beberapa alasan, terutama ketika menawarkan layanan keuangan mikro kepada usaha mikro, seperti yang diketahui bahwa jumlah usaha mikro yang cukup besar di Indonesia (Ismawan & Budiantoro, 2005). Selain itu, karena modal kecil, status hukum yang lemah, dan ketergantungan parsial pada manajemen tradisional, usaha mikro memiliki sumber daya keuangan yang terbatas, yang menghalangi mereka untuk memanfaatkan jasa lembaga keuangan formal (bank), yang selalu menggunakan prinsip perbankan dalam menentukan pinjaman mereka (Sumodiningrat, 2003). Selain itu, hal ini dipandang sangat penting dari sudut pandang peminjam kredit mikro karena pengusaha biasanya menghadapi batasan modal ketika melakukan investasi baru atau menerapkan inovasi teknologi. Pengusaha akan berjuang untuk memperluas perusahaan mereka karena pada umumnya pengusaha mikro kekurangan sumber daya keuangan untuk melakukannya.

BPR dan BRI Unit merupakan LKM formal dan pegadaian, koperasi, LPD dan lembaga kredit desa merupakan LKM informal di Indonesia. Masing-masing LKM ini memiliki standar, kemampuan, dan tujuan, tetapi mereka semua memiliki tujuan yang sama membantu UKM mendapatkan akses permodalan.

Akses keuangan yang diberikan terdiri dari tabungan mikro, kredit mikro, asuransi mikro, dan transfer bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

**Tabel 1. 1 Jumlah Pelaku Usaha LKM Berdasarkan Provinsi**

Provinsi	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Aceh</b>	-	-	1	2	2
<b>Banten</b>	3	4	7	7	6
<b>Bengkulu</b>	1	3	3	3	3
<b>D.I Yogyakarta</b>	-	2	5	4	6
<b>DKI Jakarta</b>	-	-	-	-	1
<b>Jambi</b>	-	-	1	1	1
<b>Jawa Barat</b>	14	18	22	26	28
<b>Jawa Tengah</b>	90	104	86	108	122
<b>Jawa Timur</b>	3	6	16	20	23
<b>Kalimantan Selatan</b>	-	-	-	1	1
<b>Kalimantan Tengah</b>	1	1	1	1	1
<b>Kalimantan Timur</b>	-	-	1	1	1
<b>Lampung</b>	6	9	9	9	10
<b>Maluku</b>	-	-	-	1	1
<b>Nusa Tenggara Barat</b>	2	2	2	3	3
<b>Papua</b>	-	-	1	1	1
<b>Riau</b>	-	-	-	2	2
<b>Sulawesi Barat</b>	-	7	7	1	1
<b>Sulawesi Selatan</b>	-	-	1	1	1
<b>Sumatra Barat</b>	9	23	17	8	8
<b>Sumatra Selatan</b>	-	-	-	1	2
<b>Sumatra Utara</b>	-	1	3	3	3
<b>Jumlah</b>	129	180	183	204	227

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan

LKM hadir di 22 dari 34 provinsi pada tahun 2020. Wilayah Jawa Tengah memiliki LKM terbanyak, yaitu 53,74 persen dari seluruh LKM, dengan 122 LKM, diikuti oleh Jawa Barat dengan 28 LKM, dan Jawa Timur dengan 23 LKM. Pertumbuhan Pelaku Usaha LKM menunjukkan minat masyarakat terhadap program kredit mikro pada LKM. Bantuan permodalan dalam bentuk pembiayaan diharapkan dapat digunakan untuk membantu para pengusaha memenuhi kebutuhan permodalan mereka semaksimal mungkin. Bantuan kredit yang diberikan dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin, yaitu untuk meningkatkan jumlah uang yang diterima oleh perusahaan. Peningkatan pendapatan ini dapat dijadikan barometer betapa pentingnya kredit bagi pendapatan pengusaha.

Pendapatan adalah ukuran kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan materialnya dalam jangka waktu tertentu, seringkali satu bulan. Sekalipun ada banyak faktor selain uang yang dapat diperhitungkan untuk melanjutkan suatu perusahaan, memiliki pendapatan menunjukkan bahwa hal itu dapat dilakukan untuk mempertahankannya. Pendapatan sering digunakan sebagai standar dalam menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat dan keberhasilan ekonomi suatu negara. Oleh karena itu, pendapatan akan dicatat setiap kali komoditas atau jasa diubah menjadi uang tunai atau aset legal lainnya. Besar kecilnya pendapatan usaha yang diperoleh oleh pelaku usaha tergantung kepada besar kecilnya modal yang digunakan (Uci, 2017).

Salah satu unsur yang mempengaruhi pendapatan UMKM adalah modal. Operasi produksi membutuhkan modal dalam setiap kegiatan ekonomi. Bahkan di zaman sekarang ini, para pelaku bisnis masih mencari cara untuk berinvestasi dalam rangka meningkatkan produktivitas mereka atau untuk bersaing dengan orang-orang perusahaan lain (Sukirno, 2005). Salah satu tantangan yang dihadapi oleh para pengusaha, khususnya pemilik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah permodalan. Komponen terpenting dalam memulai usaha adalah modal, yang sebagian besar digunakan oleh pengusaha UMKM dari dana sendiri dan sebagian dari pinjaman. Karena modal yang digunakan berbeda, kemampuan pengusaha untuk mengembangkan usahanya tetap terkendala oleh modal. Faktor lainnya antara lain adalah tenaga kerja, diduga berpengaruh terhadap pendapatan UMKM selain faktor permodalan. Tenaga kerja memiliki dampak yang signifikan terhadap pendapatan. Seperti yang diketahui, jumlah output atau produksi yang kemudian dihubungkan dengan pendapatan tergantung pada tenaga kerja menurut teori faktor produksi. Jumlah karyawan di sini bervariasi, dan seiring bertambahnya angkatan kerja, pendapatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah juga meningkat.

Berdasarkan studi empiris menggunakan metode Propensity Score Matching (PSM), Imai et al. (2010) menemukan bahwa *household* di India yang berpartisipasi dalam program pembiayaan kredit memiliki dampak positif terhadap peningkatan pendapatan mereka yang tidak berpartisipasi program kredit. Menurut temuan penelitian sebelumnya tentang hubungan antara modal

UMKM dan pendapatan, modal ventura secara signifikan mempengaruhi perkembangan perusahaan UMKM. Lebih banyak bisnis akan berkembang sebagai akibat dari peningkatan penggunaan modal dan akses yang lebih mudah ke uang (Purwanti 2012). Besarnya modal yang dimiliki berdampak pada tingkat keuntungan yang dapat diperoleh, yang berdampak besar terhadap pendapatan UKM. Strategi yang paling efektif untuk mempertahankan arus perusahaan adalah memiliki modal kerja yang tinggi, yang juga dapat berdampak pada pendapatan (Purnamayanti et al, 2014).

Dengan pemberian kredit dan permodalan, kredit mikro ini memberikan dampak yang baik terhadap pendapatan UMKM di BPR Nusamba Mengwi. Karena tingkat kredit yang tinggi saat ini akan dapat meningkatkan modal kerja perusahaan kecil, hasil pemberian kredit dan modal yang tinggi akan dapat meningkatkan pendapatan mereka (Purnamayanti et al, 2014). Temuan ini juga diperkuat dengan data empiris yang menunjukkan bahwa jumlah kredit yang ditawarkan memiliki hubungan dengan jumlah modal yang tersedia, semakin besar jumlah kredit yang diberikan, semakin baik kemampuan perusahaan untuk menumbuhkan modal dan memperluas pertumbuhan usahanya. (Setiawina, 2005).

Dampak kredit mikro terhadap pendapatan yang diberikan kepada usaha mikro perlu diuji secara empiris karena penggunaan kredit yang diperoleh pelaku UMKM menghadapi banyak tantangan karena faktor-faktor seperti dampak perubahan kondisi lingkungan terhadap industri pertanian, industri perikanan, dan faktor lainnya.

Dari uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti dampak program kredit mikro tersebut terhadap tingkat pendapatan para UMKM. Sehingga penulis mengangkat topik dengan judul **“Analisis Dampak Kredit Mikro Terhadap Tingkat Pendapatan UMKM di Indonesia”**

## **1.2 Perumusan Masalah**

Masalah utamanya adalah kurangnya dana bagi para pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya dan dari pihak perbankan juga kesulitan dalam penyaluran kredit dengan berkembangnya lembaga keuangan mikro saat ini, maka salah satu solusi dalam pengembangan UMKM adalah perluasan modal yang

diperoleh dari Lembaga keuangan mikro. Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, maka pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Apakah ada dampak atau pengaruh kredit mikro berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan/penghasilan UMKM di Indonesia?
2. Apakah ada dampak atau pengaruh aset UMKM terhadap pendapatan/penghasilan UMKM di Indonesia?
3. Apakah ada dampak atau pengaruh jumlah tenaga kerja UMKM terhadap pendapatan/penghasilan UMKM di Indonesia?
4. Apakah ada dampak atau pengaruh lama usaha UMKM terhadap pendapatan/penghasilan UMKM di Indonesia?

### **1.3 Tujuan Umum Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dijelaskan diatas ,secara umum tujuan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis:

1. Menganalisis ada atau tidaknya dampak atau pengaruh kredit mikro terhadap tingkat pendapatan/penghasilan UMKM di Indonesia
2. Menganalisis ada atau tidaknya pengaruh atau dampak aset UMKM terhadap tingkat pendapatan/penghasilan UMKM di Indonesia
3. Menganalisis ada atau tidaknya pengaruh atau dampak tenaga kerja UMKM terhadap tingkat pendapatan/penghasilan UMKM di Indonesia
4. Menganalisis ada atau tidaknya pengaruh atau dampak lama usaha UMKM terhadap tingkat pendapatan/penghasilan UMKM di Indonesia